Agustus, 2024, Volume 6 Nomor 2
E-ISSN 2656-1026

KINERJA PEMERINTAHAN DESA RANTAU ASEM KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Samsiah Nelly
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Palangka Raya
(email : snelly203@gmail.com)
Nouvellin Angelina Putri, Jane Anita Margaretha, Susan Anggelia, Belki, Imelda Charolina
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Kristen Palangka Raya

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Salah satu tugas dari Pemerintah Desa adalah melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah Desa Rantau Asem. Pendekatan yang digunakan adalah kualitiatif deskriftif. Dalam penelitian ini didasarkan pada teori: produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas yang disesuaikan dengan PERMENPANRB No : Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Rantau Asem dalam pelayanan kependudukan dikategorikan cukup baik, meskipun belum maksimal dan masih perlu dilakukan pembenahan.

Keyword : Kinerja, Pemerintah Desa, Rantau Asem

Pendahuluan

Pemerintahan Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional. Kehadiran pemerintah desa dinilai memegang peranan penting karena memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal ini diperkuat karena pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa menjadi potensi sumber daya manusia yang dapat nermamfaat baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan. Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan,

maka pemerintah desa memilki tugas dan peran yang strategis dalam pembangunan mayarakat desa. Tugas ini tercermin ketika diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa., dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 juga tentang Desa. Tugas tersbut adalah : menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, dan memberdayakan msyarakat. Melihat tugas dan peran tersebut pemerintah desa sesunggunya mengembang amanah yang cukup berat. Sementara pada saat yang sama pemerintah desa dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*) yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan partisifatif. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti penting sebagai basis penyelenggara pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Oleh karena itu pemerintah desa harus memilki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja terutama dalam setiap melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pada pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut Ivancevich (2006:99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Menurut Wibowo (2007: 7) bahwa kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya kinerja adalah hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses pekerjannya berlangsung. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat propit oriented dan nono profit oriened yang dihasilkan selama satu periode waktu (Irham Fahmi: 2015). Dari pengertian tersebut, maka dapat diikatakan bahwa kinerja adalah refleksi dari sikap pribadi seseorang individu atau sekelompok tentang pekerjaan atau kerjasama, seperti sikap pegawai dalam bekerja dan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan.

Malayu, SP (2009) menyatakan beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan serta membina kinerja, yaitu: 1) Pembinaan disiplin kerja 2) Pengembangan kepribadian 3) Pengikutsertaan pegawai dalam proses pengambilan karir dan masa depannya 4) Memberikan penghargaan yang wajar 5) Mengelola konflik dan kompetisi 6) Menciptakan suasana saling menghormati di antara pegawai 7) Kesempatan promosi dan pengembangan karir 8) Pengertian pimpinan terhadap pegawai yang mengalami masalah pribadi 9) Jaminan perlakuan yang adil dan objektif 10) Memberikan pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan 11) Adanya pengakuan 12) Imbalan pengakuan dan 13) Imbalan keuangan atau financial rewards

Agus Dwiyanto (2006 : 50), berpendapat bahwa untuk mengukurt tingkat kinerja, dapat digunakan indikator kinerja yaitu : Produktivitas , Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas.

a. Produktivitas

Swastha dan Sukotjo (2002), berpendapat bahwa produktivitas adalah sebuah konsepsi yang menggambarkan hubungan antara hasil jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Selanjunya menurut Handoko (2003) produktivitas

didefinisikan sebagai hubungan masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produksi Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien. Untuk mengukur produktifitas kerja aparat Desa digunakan beberapa indikator yaitu: 1. Sikap Mental Perilaku Aparat Pemerintah Desa Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Sikap mental bersumber dari persepsi aparat terkait perasaan terhadap tugas yang dijalankan 2. Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Kemampuan aparat pemerintah desa dituntut secara optimal dalam menjalan tugas dan tanggung jawabnya khususnya dalam memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat. 3. Semangat Kerja Semangat kerja adalah suatu dorongan untuk melakukan pekerjaan dengan giat dan antusias, yang mendorong setiap tugas yang diembang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. cepat dan baik.

b. Kualitas Layanan

Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003, standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi : Prosedur Pelayanan; Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Waktu Penyelesaian; waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Biaya Pelayanan; Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Produk Pelayanan; hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Saranan dan Prasarana; penyediaan saran dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan; kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terus digalakan dengan tujuan menghadirkan pelayanan birokrasi yang berkualitas.

c. Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut Astuti Dan Yulianto, (2016) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kemudian Miriam (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas ber-makna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi Dalam konteks pemerintahan Desa, salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan administrasi kependudukan. Dalam menjalankan tugas tersebut. diharapkan memegang prinsip keterbukaan, ketanggapan, kreatifitas dan akuntabilitas dalam pelayanan dari segenap jajaran aparatur pemerintah desa. Salah satu perwujudan pelaksanaan dari akuntabilitas pemerintahan desa adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.

d. Administrasi Kependudukan

Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. kemudian di dalam penjelasan Undang Undang Administrasi Kependudukan tersebut dijelaskan bahwa : administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negera. dari segi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif Pelaksanaan administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan berperan strategis dalam pembangunan. Faktor penyebabnya karena melalui pelaksanaan sistem administrasi kependudukan tersebut dapat diketahui tentang jumlah penduduk, karakteristk penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduksertakondisi daerah tempat tinggal penduduk. selain itu melalui administrasi kependudukan, dapat memudahkan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemerintah terkait program, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Selain itu, juga sangat bermamfaat sebagai sumber data dalam pelaksanaan Pileg, Pilpres, Pemilukada, dan Pilkades.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Alasannya karena pendekatan kualitatif mempunyai fleksibilitas yang tinggi bagi peneliti ketika menentukan langkah-langkah penelitian. Pendekatan kualitatif dapat memberi kesempatan kepada peneliti dalam berekspresi untuk membuat penjelasan yang lebih luas dalam bentuk penafsiran berdasarkan kepastian intuitif.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari Informan sedangkan data skunder adalah data kepustakaan, artikel dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian yang menjadi informan berjumlah lebih dari 6 orang, terdiri dari : Kepala Desa, Staf dan Masyarakat umum. Untuk teknik pengumpulan data digunakan beberapa jenis, yaitu Observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) dan studi kepustakaan.

Kemudian untuk menguji validitas data, menggunakan metode triangulasi di mana untuk mendapatkan data diambil dari beberapa sumber. Menurut N. Narayanasamy (2009 : 32) bahwa triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Patton (dalam Sutopo, 2002: 78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu: triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi teori. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan metode. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Interaktif (Interactive Model Of Analysis) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono : 2015). Aktivitas dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu

Collection Data, Reduction Data, Display Data, dan Conclusion Drawing/Verifyng.

Selanjutnya fokus dalam penelitian ini adalah membahas pencapaian kinerja pemerintah desa Rantau Asem Kabupaten Katingan. Untuk mengkaji kinerja pemerintah desa tersebut, menggunakan indikator kinerja sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006 : 50), yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, dan Akuntabilitas.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Desa Rantau Asem dan di Rumah Masyarakat Sekitar yang berlangsung selama kurang lebih dua hari. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui wawancara yang mendalam, akhirnya diperoleh jawaban sesuai yang dinginkan yang didasarkan pada teori Agus Dwiyanto (2006: 50), yaitu:

1. Produktivitas

Dalam penelitian ini untuk mengukur produktifitas kerja aparat desa digunakan beberapa indikator yaitu: a. Sikap Mental Perilaku Aparat Pemerintah Desa Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh jawaban bahwa sikap mental aparat cukup bagus baik ketika bertugas dalam melayani maupun ketika dalam tempat dan situasi yang lain. b. Kemampuan Aparat Pemerintah Desa Kemampuan aparat pemerintah desa adalah kesanggupan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang tercermin dalam penguasaan ilmu, pengalaman dan keterampilan. Dalam konteks ini berdasarkan jawaban informan bahwa pada dasarnya kemampuan aparat Pemerintah Desa sudah cukup baik meskipun belum optimal sebagaimana mestinya.

2. Kualitas Layanan

Ciri utama pelayanan yang berkualitas adalah adanya kepuasan dari penerima layanan. Oleh karena itu dalam mengukur kualitas layanan pemerintah desa disesuaikan dengan PERMENPANRB No: Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang meliputi unsur - unsur yaitu : a. Persyaratan b. Sistem, mekanisme dan prosedur c. Waktu penyelesaian d. Biaya/tarif e. Produk spesifikasi jenis pelayanan f. Kompetensi pelaksana g. Perilaku pelaksana h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan i. Sarana dan prasarana Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dari 9 unsur tersebut telah berjalan cukup baik. Hanya pada aspek penanganan pengaduan, sarana dan dan prasarana belum optimal. Kemudian dari aspek sarana dan prasarana diketahui bahwa sarana dan prasarana belum lengkap, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti jalanan yang rusak, posko banjir, pos kamling dan posyandu yang belum optimal.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggung jawaban aparat pemerintah terhadap tugas yang dijalankan. Akuntabilitas juga merupakan ukuran yang menunjukan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat serta mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Unsur - unsur yang terkait norma dan etika pelayanan di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orentasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat. Dalam bahagian ini diperoleh jawaban bahwa akuntabilitas pelayanan yang

ditunjukkan oleh aparat desa telah berjalan cukup baik tetapi masih banyak yang harus diperhatikan dan diperbaiki seperti transparansi keuangan, kurang komunikasi dan melibatkan warga setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang kemudian dilakukan analisis mendalam, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan bahwa meskipun belum maksimal, tetapi kinerja Pemerintah Desa Rantau Asem dapat dikategorikan cukup baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Pemerintah Desa Rantau Asem telah menunjukkan kinerja cukup baik.

Namun demikian masih perlu diadakan beberapa perbaikan. Hal ini dipandang penting karena melalui aduan masyarakat Pemerintah Desa akan mengetahui lebih detil apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan warga desa. Dari aduan masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan selanjutnya. Kurangnya sarana dan prasarana mempengaruhi kualitas pelayanan aparat desa.

Referensi

Dwiyanto, Agus,dkk, (2002), *Reformasi Birokrasi di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan dan Kebijakan*, UGM.

Fahmi, Irham, (2013), *Manajemen Kinerja*, CV.Alpabeta, Bandung

Hasibuan, Malayu, S. (2009), *Manajemen*, Bumi Aksara, Bandung

Handoko, T. Hani, (2003), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Liberty, Yogyakarta

John Ivancevich, (2006). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga: Surabaya

Miriam. (2012). *Penerapan Otonomi Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo*. Yogyakarta: UNY.

Narayanasamy, N. (2009). Participatory Rural Appraisal Principles, Methods and Application. Second Edition. First Published. ISBN: 978-81-7829-885-6 (PB) h. 32

Sutopo, HB. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi. Cetakan Ke 7*. Bandung : Alfabeta.

Swastha, Basu dan Sukotjo, Ibnu, (2002), *Pengantar Bisnis Modern, Edisi Keenam*, Liberty, Yogyakarta.

Wibowo (2007) *Menejemen Kinerja.* Yogjakarta. Raja Grafindo Persada